

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE 2017-2019**

LAPORAN MAGANG



Disusun Oleh :

Tiara Rindha Rifani

18212069

Program Studi Akuntansi

Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Islam Indonesia

2021

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE 2017-2019**

LAPORAN MAGANG

Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh :

Tiara Rindha Rifani

18212069

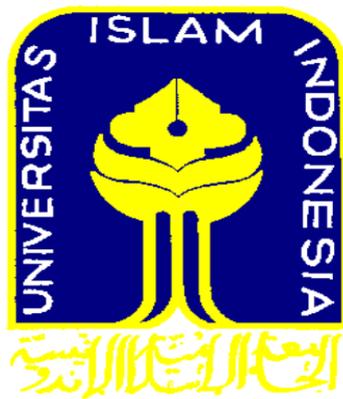
Program Studi Akuntansi

Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Islam Indonesia

2021

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE 2017-2019



Disusun Oleh :

Nama : Tiara Rindha Rifani

No. Mahasiswa : 18212069

Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal: 16 Juli 2021

Dosen Pembimbing



(Chivirind Ghanevi Ayuntari, SE.,M.Acc.,Ak.,CA)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang sebagai Tugas Akhir ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan atau plagiarisme karya orang lain. Apabila di kemudian hari telah terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 16 Juli 2021



Tiara Rindha Rifani

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2019”.

Laporan Tugas Akhir adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Program Diploma III Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam penyusunan Tugas Akhir ini :

1. Ibu Dra, Marfuah., SE., M.Si, Ak, CA, Cert. SAP selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan tugas akhir.
2. Ibu Chivalrind Ghanevi Ayuntari, SE., M.Acc., Ak., CA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan tugas akhir.
3. Ibu Selfira Salsabilla SE., M. Ak., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama perkuliahan.
4. Ibu Yestias Maharani SE., M.Acc., Ak., CA selaku dosen pada Program Studi Diploma III Akuntansi yang telah memberikan arahan, semangat, dan nasihat saat perkuliahan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Diploma III Akuntansi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan arahan dan ilmu pengetahuan kepada seluruh mahasiswanya
6. Ibu Suwarni selaku orang tua yang selalu mendoakan saya setiap hari dan selalu memberikan dukungan dalam keadaan suka dan duka, serta yang selalu memberikan ridhonya sehingga saya mampu menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Bapak Sunardi selaku orang tua saya yang selalu mengiringi langkahku dengan doa dan kasih sayang, berkat didikan dan kerja kerasnya sehingga saya bisa meraih Pendidikan ditingkat universitas.
8. Kakak dan Adik saya, Devita Kumala Sari, Hermawan Adhi Pradana, Tiara Rindhi Rifana yang selalu memotivasi saya untuk bekerja keras dalam berjuang meraih Pendidikan setinggi mungkin.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang dapat membangun Laporan Tugas Akhir ini. Penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat serta dapat memberikan informasi bagi para pembaca.

Yogyakarta, 16 Juli 2021

Penulis



Tiara Rindha Rifani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Pemikiran Magang.....	1
1.2 Tujuan Magang	6
1.3 Target Magang	6
1.4 Bidang Magang	6
1.5 Lokasi Magang.....	7
1.6 Jadwal Magang.....	7
1.7 Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Anggaran Sektor Publik	10
2.1.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik.....	10
2.1.2 Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik.....	10
2.1.3 Pentingnya Anggaran Sektor Publik.....	11
2.1.4 Fungsi Anggaran Sektor Publik	12
2.1.5 Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik.....	13
2.1.6 Tujuan Penyusunan Anggaran Sektor Publik	14
2.1.7 Manfaat Anggaran Sektor Publik.....	15
2.2 Laporan Keuangan Sektor Publik	15
2.2.1 Definisi Laporan Keuangan Sektor Publik	15
2.2.2 Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik	16
2.2.3 Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dengan Sektor Swasta ..	17
2.2.4 Pentingnya Laporan Keuangan	19
2.2.5 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Sektor Publik.....	20
2.2.6 Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik	21

2.2.7 Manfaat Laporan Keuangan Sektor Publik	23
2.3 Laporan Realisasi Anggaran	23
2.3.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran	23
2.3.2 Elemen Laporan Realisasi Anggaran	24
2.3.3 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran	26
2.3.4 Konsep Belanja Pemerintah	27
2.4 Efektivitas	27
2.4.1 Pengertian Efektivitas	27
2.4.2 Pengukuran Efektivitas	28
2.5 Efisiensi.....	29
2.5.1 Pengertian Efisiensi.....	29
2.5.2 Pengukuran Efisiensi.....	30
BAB III ANALISIS DESKRIPTIF.....	44
3.1 Data Umum	44
3.1.1 Gambaran Umum	44
3.1.2 Visi dan Misi	45
3.1.3 Tujuan	46
3.1.4 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi	46
3.1.5 Susunan dan Struktur Organisasi	56
3.2 Data Khusus	58
3.2.1 Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja pada BKD.....	58
3.2.2 Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada BKD	64
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72
4.1 KESIMPULAN	72
4.2 SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Magang.....	8
Tabel 2.1 Perbandingan Laporan Keuangan Pemerintah dengan sektor swasta...	17
Tabel 2.2 Perbandingan Laporan Keuangan	18
Tabel 2.3 Kriteria Efektivitas.....	29
Tabel 2.4 Kriteria Efisiensi	31
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Belanja BKD Periode 2017-2019.....	59
Tabel 3.2 Realisasi Belanja dan Realisasi Belanja L BKD Periode 2017-2019 ...	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Lokasi Badan Kepegawaian Daerah DIY	7
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Magang	78
Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017	79
Lampiran 3: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018	80
Lampiran 4 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019	81



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Efek dari krisis yang berpengaruh pada suatu perekonomian menjadikan sebuah negara perlu melakukan perbaikan pengelolaan keuangan. Perbaikan pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan penyusunan anggaran yang baik demi keberlangsungan usaha suatu organisasi. Dalam artikel Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial yang ditinjau oleh Armala dan Pandoyo (2020) tujuan penyusunan anggaran adalah untuk mengkomunikasikan rencana kerja yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, yang memberikan harapan bagi manajemen kepada pihak-pihak terkait agar anggaran dapat dimengerti, didukung dan dilaksanakan. Penyusunan anggaran sangatlah penting tidak lepas dari peranan pemerintah agar kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan optimal dan baik.

Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilitas, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi dan digunakan untuk menilai kinerja. Penilaian kinerja dapat dilakukan dengan melihat laporan realisasi anggaran dalam beberapa periode. Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang berisi informasi mengenai laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan penggunaan dana yang disusun secara sistematis serta komprehensif. Sebelum merealisasikan suatu program, sangat dibutuhkan perencanaan yang baik untuk mencapai tujuan program tersebut. Salah satunya adalah dengan perencanaan

anggaran. Di lingkungan pemerintah maupun sektor publik, anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu target maupun sasaran yang diinginkan dalam periode tertentu.

Anggaran di sektor publik berbeda dengan anggaran di sektor swasta. Di sektor swasta, anggaran merupakan hal yang harus dirahasiakan, sedangkan di sektor publik anggarannya harus dipublikasikan kepada masyarakat agar dapat dievaluasi dan diperbaiki di tahun yang akan datang. Menurut Sumenge (2013), anggaran publik digunakan sebagai alat perencanaan yang dapat mengindikasikan berapa target yang harus dicapai pemerintah, selain itu anggaran sebagai alat pengendalian dapat mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dapat dibelanjakan.

Anggaran yang telah dibuat sangat berperan positif sebagai alat pengendalian dalam berbagai kegiatan yang ada di pemerintahan. Kinerja suatu pemerintah dinilai dan dilihat melalui anggaran yang sudah dibuat, oleh karena itu pengeluaran pemerintah sangat diharapkan agar pelayanan masyarakat mendapatkan porsi yang relatif besar. Kegiatan belanja modal merupakan bentuk pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan tertib, efektif, efisien, transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan taat dengan peraturan perundang-undangan.

Anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disusun berdasarkan program prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait langsung pada program dan kegiatannya. Jenis belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tetapi tidak terkait langsung pada program dan kegiatannya. Belanja tidak langsung meliputi belanja bunga, subsidi dan belanja tidak terduga.

Menurut Kawatu (2019), Belanja dalam laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik melalui pajak daerah yang telah mereka bayarkan untuk kepentingan agar dapat mengetahui apakah dana tersebut digunakan dengan semestinya secara efektif, efisien dan berorientasi pada kepentingan publik. Laporan realisasi merupakan suatu laporan pertanggungjawaban yang harus dilakukan dan dilaporkan. Melalui laporan pertanggung jawaban yang telah dibuat tersebut yang akan dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk melihat kemajuan suatu organisasi melalui analisis efektivitas dan efisiensi.

Analisis tersebut sangatlah penting dilakukan untuk mengetahui apakah suatu pemerintah daerah telah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif dan efisien untuk menghindari pengeluaran yang tidak terlalu penting agar tidak terjadi pemborosan dalam penggunaan anggaran. Pengukuran efektivitas dan efisiensi dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja.

Kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap keefektifan dan keefisienan dalam penggunaan anggaran keuangan karena semakin efektif dan efisien penggunaan anggaran dan belanja daerah maka kinerja keuangan daerah akan semakin tinggi juga tingkat kinerjanya. Apabila efektivitas dan efisiensi kinerja telah tercapai maka akan tercipta akuntabilitas kinerja yang merupakan suatu visi dari seluruh organisasi sektor publik. Efektivitas dan efisiensi anggaran belanja sangatlah penting dalam penyelenggaraan suatu organisasi untuk mengetahui sampai di mana tingkat ketercapaian tujuan sebuah organisasi.

Analisis efektivitas dan efisiensi sangat berpengaruh terhadap penilaian kinerja pemerintah karena dengan analisis tersebut masyarakat dapat mengetahui kondisi keuangan suatu organisasi. Menurut Basariyah (2017), pengukuran kinerja sangat dibutuhkan untuk menilai akuntabilitas suatu organisasi agar menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Menurut Ropa (2016), akuntabilitas tidak hanya sekedar kemampuan untuk menunjukkan uang publik tersebut dibelanjakan dengan efektif dan efisien. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam melakukan penilaian kinerja, yaitu dengan menilai berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam program atau kegiatannya.

Pentingnya analisis pada penilaian kinerja sebagai alat bantu dalam memperoleh suatu informasi agar dapat menilai kinerja anggaran belanja di instansi pemerintah. Oleh karena itu mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penilaian kinerja keuangan sangatlah penting karena apabila realisasi

anggaran tersebut tidak efektif, maka akan berpengaruh terhadap kemajuan pada instansi tersebut. Maka perlu pengambilan keputusan dalam penyusunan anggaran belanja daerah agar tetap terlaksana dengan efektif dan efisien. Laporan tugas akhir ini dilakukan untuk mengetahui apakah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah merealisasikan anggaran belanjanya secara efektif dan efisien. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2019**”.

1.2 Tujuan Magang

Adapun tujuan yang ingin dicapai setelah melaksanakan kegiatan magang :

1. Mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017-2019.
2. Mengetahui tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017-2019.

1.3 Target Magang

Adapun target yang ingin dicapai setelah melaksanakan kegiatan magang :

1. Mampu menjelaskan tingkat efektivitas anggaran belanja di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017-2019.
2. Mampu menjelaskan tingkat efisiensi anggaran belanja di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017-2019.

1.4 Bidang Magang

Selama kegiatan magang di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyusunan laporan tugas akhir dilakukan di bidang keuangan pada bendahara penerimaan maupun pengeluaran diantaranya membuat kendali manual dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), membuat buku kas umum dalam surat pertanggungjawaban (BKU SPJ),

membuat bukti memorial dan menginput belanja uang persediaan (UP) dalam laporan pertanggungjawaban.

1.5 Lokasi Magang

Nama Instansi : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Alamat : Jl. Kiai Mojo, No.56, Bener, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
 Kode Pos : 55244
 Website : <http://bkd.jogjaprov.go.id>



Gambar 1.1 Peta Lokasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1.6 Jadwal Magang

Kegiatan magang dilaksanakan mulai tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan 31 Maret 2021 dan dijadwalkan 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu. Kegiatan magang dimulai dari jam 07.30-16.00 dengan mengikuti peraturan

yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Magang

No	Keterangan	Waktu Pelaksanaan																											
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penulisan TOR																												
2	Pelaksanaan Magang																												
3	Bimbingan dengan Dosen Pembimbing																												
4	Pengumpulan data																												
5	Penyusunan laporan magang																												
6	Ujian Tugas Akhir																												

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan laporan magang secara garis besar menggunakan sistematika pelaporan melalui empat bab, diantaranya :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai dasar pemikiran magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah terkait penulisan tugas akhir.

BAB III : ANALISIS DESKRIPTIF

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan dari hasil pengamatan selama magang dan menganalisis data yang sudah diperoleh selama magang di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembahasan ini terbagi menjadi dua bahasan yaitu data umum dan data khusus. Data umum merupakan gambaran umum instansi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan struktur organisasi beserta tugas-tugasnya. Sedangkan data khusus berisi penjelasan terkait pembahasan mengenai efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil analisis data yang telah disusun sebelumnya beserta saran terkait efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Anggaran Sektor Publik

2.1.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa anggaran publik berisi rencana suatu kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk sederhana anggaran publik merupakan salah satu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi.

Menurut Halim dan Kusufi (2016) menjelaskan bahwa anggaran merupakan dokumen yang berisi estimasi kerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja.

2.1.2 Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik

Adapun jenis-jenis anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2018) yaitu sebagai berikut :

1) Anggaran Operasional

Anggaran operasional digunakan sebagai alat kebutuhan sehari-hari untuk menjalankan pemerintahan yaitu belanja rutin. Belanja rutin merupakan pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset maupun kekayaan bagi pemerintah.

2) Anggaran Modal atau Investasi

Rencana jangka panjang dan pembelanjaan aktiva tetap seperti peralatan, gedung, kendaraan dan lain sebagainya. Pengeluaran dengan modal yang besar biasanya melalui peminjaman. Belanja investasi maupun modal yaitu pengeluaran yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran yang dapat menambah aset atau kekayaan pemerintahan serta menambah anggaran rutin.

2.1.3 Pentingnya Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2018) anggaran pada sektor publik dapat membantu dalam menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti air, listrik, kualitas pada kesehatan, pendidikan agar dapat terjamin. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi pada keputusan pemerintah melalui anggaran yang telah dibuat.

Mardiasmo (2018) mengatakan bahwa anggaran di sektor publik sangatlah penting yaitu diantaranya :

- 1) Anggaran di pemerintah digunakan untuk memberikan arahan dalam pembangunan sosial ekonomi, dan menjamin kesinambungan dalam meningkatkannya kualitas hidup masyarakat.
- 2) Anggaran diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.

- 3) Anggaran perlu meyakinkan bahwa pemerintah sudah bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam hal ini anggaran publik oleh lembaga-lembaga publik yang sudah ada.

2.1.4 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi menurut Mardiasmo (2018) diantaranya :

- 1) Anggaran sebagai alat perencanaan merupakan suatu alat dalam perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan suatu organisasi.
- 2) Anggaran sebagai alat pengendalian memberikan perencanaan secara detail mengenai pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang sudah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan yang disebabkan karena pengeluaran.
- 3) Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal sebagai alat untuk menstabilkan kondisi ekonomi dan mendorong dalam pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik dapat mengetahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat memprediksi dan mengestimasi keadaan ekonominya.
- 4) Anggaran sebagai alat penilaian kinerja merupakan wujud dari sebuah komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (Legislatif). Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggarannya.

- 5) Anggaran sebagai alat motivasi digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien untuk mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

2.1.5 Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik

Prinsip-prinsip anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2018) meliputi :

1. Otorisasi oleh legislatif

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif sebelum eksekutif membelanjakan anggaran tersebut.

2. Komprehensif

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

3. Keuntungan anggaran

Semua penerimaan dan belanja pemerintah terhimpun dalam dana umum.

4. Periodik

Anggaran merupakan suatu proses periodik yang bersifat tahunan maupun multi-tahunan.

5. Akurat

Estimasi anggaran tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong untuk melakukan pemborosan

dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya pengeluaran.

6. Jelas

Anggaran sebaiknya sederhana, tidak membingungkan agar dapat dipahami oleh masyarakat.

7. Diketahui publik

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

2.1.6 Tujuan Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Ada 4 tujuan penyusunan anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2018) diantaranya :

- a) Membantu pemerintah untuk mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah.
- b) Membantu menciptakan efisien dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
- c) Memungkinkan bagi pemerintah dalam memenuhi prioritas belanja.
- d) Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.1.7 Manfaat Anggaran Sektor Publik

Adapun manfaat anggaran sektor publik menurut Nafarin (2015) antara lain :

1. Semua proses kegiatan dapat diarahkan untuk mencapai tujuan bersama.
2. Sebagai alat untuk menilai kelebihan maupun kekurangan pegawai.
3. Memotivasi para pegawai.
4. Agar terhindar dari pemborosan dari pembayaran yang kurang perlu.

2.2 Laporan Keuangan Sektor Publik

2.2.1 Definisi Laporan Keuangan Sektor Publik

Menurut Kawatu (2019), laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya suatu tuntunan yang semakin besar pada pelaksanaan akuntabilitas publik yang menimbulkan implikasi bagi pihak manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik yaitu salah satunya dengan informasi akuntansi berupa laporan keuangan yang berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan.

Adapun pendapat lain menurut Sujarweni (2021) yang mendefinisikan bahwa laporan keuangan sektor publik merupakan salah satu komponen sangat penting yang berasal dari kejadian transaksi yang dilakukan pada organisasi sektor publik.

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik menurut Kawatu (2019) diantaranya :

1. Kepatuhan dan Pengelolaan

Laporan keuangannya memberikan jaminan kepada para pengguna laporan keuangan dari pihak otoritas agar pengelolaan sumber dayanya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang sudah ditetapkan sebelumnya.

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada publik untuk memonitor kinerja agar dapat dievaluasi oleh manajemen untuk memberikan dasar dalam mengamati *trend* antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan.

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi

Laporan keuangan memberikan dasar dalam perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dengan memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4. Hubungan Masyarakat

Laporan keuangannya memberikan kesempatan kepada suatu organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada para pemakai.

2.2.3 Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dengan Sektor Swasta

Adapun perbedaan laporan keuangan pemerintah dengan sektor swasta menurut Mardiasmo (2009) dapat dilihat di tabel 2.1 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perbandingan Laporan Keuangan Pemerintah dengan Sektor Swasta

Perbedaan	
Laporan Departemen Pemerintah	Laporan Keuangan Sektor Swasta
Fokus pada Finansial dan Publik	Fokus pada Finansial
Kinerja diukur secara finansial dan non-finansial	Sebagian besar kinerja diukur secara finansial
Pertanggungjawabannya kepada parlemen dan masyarakat luas	Pertanggungjawabannya kepada pemegang saham dan kreditur
Berfokus pada bagian organisasi	Berfokus pada organisasi secara keseluruhan
Melihat masa depan secara detail	Tidak dapat melihat masa depan secara detail
Aturan pelaporan ditentukan pada departemen keuangan	Aturan pelaporan ditentukan berdasarkan undang-undang, standar akuntansi, dan praktik akuntansi
<i>Cash accounting</i>	<i>Accrual accounting</i>
Persamaan	
Laporan Departemen Pemerintah	Laporan Keuangan Sektor Swasta
Berperan sebagai hubungan masyarakat (public relations)	

Sumber : Mardiasmo (2009)

Adapun perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan sektor bisnis dan sektor sosial menurut Mahmudi (2011) dapat dilihat di tabel 2.2 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perbandingan Laporan Keuangan

Keterangan	Laporan Keuangan Sektor Publik	Laporan Keuangan Sektor Bisnis	Laporan Keuangan Sektor Sosial
Bentuk Laporan Keuangan	1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
	2) Laporan Realisasi Anggaran	2) Laporan Laba Rugi	2) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana
	3) Laporan Operasional	3) Laporan Perubahan Ekuitas	3) Laporan Perubahan Ekuitas
	4) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	4) Laporan Arus Kas	4) Laporan Arus Kas
	5) Laporan Perubahan Ekuitas	5) Catatan Atas Laporan Keuangan	5) Catatan Atas Laporan Keuangan
	6) Laporan Arus Kas		
	7) Catatan Atas Laporan Keuangan		
Elemen (Kandungan Informasi) Laporan keuangan	1) Belanja	1) Biaya	1) Biaya
	2) Transfer	2) Gains	2) Surplus/Defisit
	3) Surplus/Defisit	3) Losses	3) Saldo Dana
	4) Penerimaan Pembiayaan	4) Laba	
	5) Pengeluaran Pembiayaan		
	6) Pembiayaan Neto		
	7) SiLPA/IPSAS		

Keterangan	Laporan Keuangan Sektor Publik	Laporan Keuangan Sektor Bisnis	Laporan Keuangan Sektor Sosial
Standar Akuntansi	PSAP, IPSAS	PSAK, IFRS	PSAK khusus nonprofit
Badan Penyusun Standar Akuntansi	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan	Ikatan Akuntan Indonesia	Ikatan Akuntan Indonesia
<i>Stakeholder</i> Utama	Mayarakat, DPR/DPRD, Investor, Donor, Kreditur	Pemegang saham (investor) dan kreditur	Masyarakat, Donor, Kreditur
Sistem Akuntansi	1) Banyak pilihan (akuntansi kas, akrual, anggaran, komitmen, dan dana)	1) Menggunakan akuntansi akrual	1) Banyak pilihan (akuntansi kas, akrual, anggaran, komitmen, dan dana)
	2) Bisa <i>single entry</i> maupun <i>double entry</i>	2) <i>Double entry</i>	2) Bisa <i>single entry</i> maupun <i>double entry</i>

Sumber : Mahmudi (2011)

2.2.4 Pentingnya Laporan Keuangan

Menurut Kawatu (2019), di masyarakat yang maju peradapannya, pertanggungjawaban tidak cukup dengan laporan saja, tetapi perlu didukung dengan laporan pertanggungjawaban tertulis. Penyajian laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis pada kinerja keuangan yang telah dicapai.

Ada beberapa alasan laporan keuangan perlu dipublikasikan menurut Kawatu (2019) yaitu :

- a. Dari sisi internal, laporan keuangan sebagai alat pengendalian digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit kerja di dalamnya. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal yang pertanggungjawabannya kepada satuan kerja kepala daerah.
- b. Dari sisi eksternal, laporan keuangan suatu pemerintah merupakan pertanggungjawaban eksternal yang pertanggungjawabannya kepala daerah pada masyarakat, investor, kreditur, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

2.2.5 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Sektor Publik

Pemerintah daerah berupaya untuk memperbaiki kualitas pada laporan keuangannya. Ciri-ciri laporan yang disajikan pemerintah daerah yang dinilai berkualitas menurut Kawatu (2019) yaitu sebagai

berikut :

1. Relevan

Informasi dalam laporan keuangan yang disajikan untuk memberikan manfaat bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan.

2. Andal

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat diandalkan, tidak menyesatkan dan mengandung unsur manipulasi.

3. Dapat dibandingkan

Laporan keuangannya digunakan sebagai pembanding kinerja masa lalu atau pembanding kinerja organisasi lain yang sejenis.

4. Dapat dipahami

Laporan keuangannya memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan dapat dipahami bagi para pengguna laporan keuangan.

2.2.6 Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik

Menurut Kawatu (2019) analisis laporan keuangan dilakukan untuk meneliti pada setiap elemennya dengan membandingkan nilai elemen tertentu dengan elemen lainnya yang menghasilkan angka rasio keuangan dan memprediksi kondisi pada masa yang akan datang.

Jenis-jenis laporan keuangan pokok yang harus dibuat menurut Fitra (2019) meliputi :

1. Laporan realisasi anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola pemerintah daerah, sebagai perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan terkait aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola pemerintah daerah untuk kegiatan menyelenggarakan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan arus kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas yang berhubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas di pemerintah daerah selama periode tertentu. Unsur yang dalam laporan arus kas meliputi penerimaan dan pengeluaran kas.

6. Laporan perubahan ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas.

2.2.7 Manfaat Laporan Keuangan Sektor Publik

Secara spesifik, manfaat laporan keuangan sektor publik menurut Kawatu (2019) yaitu sebagai berikut :

- a) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah
- b) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintahan.
- c) Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran.
- d) Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

2.3 Laporan Realisasi Anggaran

2.3.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Fitra (2019), laporan realisasi anggaran adalah laporan menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Adapun pengertian lain menurut Basri (2013), mendefinisikan bahwa laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang berisikan

informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran pada ketiga pos tersebut.

2.3.2 Elemen Laporan Realisasi Anggaran

Unsur-unsur yang mencakup secara langsung laporan realisasi anggaran yang terdiri atas pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan menurut Fitra (2019). Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan adalah semua penerimaan oleh rekening kas umum daerah yang dapat menambah saldo anggaran dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali

oleh pemerintah. Belanja diklasifikan menurut klasifikasi ekonomi.

Klasifikasi ekonomi di pemerintah pusat meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial,

dan belanja lain-lain. Sedangkan lasifikasi ekonomi di pemerintah

daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal,

bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

Klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Merupakan pengeluaran pada anggaran yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan setiap harinya yang manfaatnya untuk jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, bunga, barang, subsidi, hibah, bantuan sosial.

2. Belanja Modal

Merupakan pengeluaran pada anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap maupun aset lainnya yang manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

3. Belanja Lain-lain atau Tak Terduga

Merupakan pengeluaran pada anggaran yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan untuk kedua kalinya. Contohnya penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya.

3. Transfer

Merupakan penerimaan maupun pengeluaran uang dari suatu entitas ke entitas lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

4. Surplus atau defisit

Merupakan selisih lebih atau kurang antara Pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

5. Pembiayaan Neto

Merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran tertentu.

Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pembiayaan neto.

2.3.3 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan undang-undang, pemerintah wajib membuat laporan keuangan termasuk laporan realisasi anggaran. Di mana laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen yang ada di dalam laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan dapat memberikan sebuah informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. Selain untuk memenuhi laporan keuangan, laporan realisasi anggaran juga berfungsi dalam menyediakan informasi terkait anggaran dan realisasi entitas pelaporan di dalam suatu periode tertentu. Laporan realisasi anggaran digunakan untuk menunjukkan sampai di mana suatu organisasi dapat mencapai tujuannya sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya yang disepakati legislatif dan eksekutif menurut peraturan perundang-undangan.

2.3.4 Konsep Belanja Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Belanja dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1) Belanja Langsung

Belanja langsung yaitu belanja yang dianggarkannya terkait langsung pada program dan kegiatannya. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal

2) Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung yaitu belanja yang dianggarkannya tidak terkait langsung pada program dan kegiatannya. Belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, dan belanja tidak terduga.

2.4 Efektivitas

2.4.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa efektivitas berhubungan pada tercapainya suatu tujuan maupun target. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran tujuan maupun sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatannya mencapai tujuan.

Adapun pengertian lain menurut Mahmudi (2011), efektivitas merupakan dukungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut sudah dikatakan berjalan secara efektif. Efektivitas juga dapat dilihat dari hasil kegiatan yang telah diperoleh. Jika hasil kegiatan yang diperoleh sudah mendekati sasaran, maka akan semakin tinggi juga efektivitasnya. Efektivitas berkaitan dengan terlaksana semua tugas-tugas pokok, ketepatan waktu, ketercapaiannya suatu tujuan, serta keberhasilan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang diperoleh, yang menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan dengan hasil yang dicapai.

2.4.2 Pengukuran Efektivitas

Untuk mencari tingkat efektivitas yaitu melalui perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Untuk mengukur tingkat efektivitas anggaran belanja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan bahwa kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja dapat dilihat pada tabel 2.3 :

Tabel 2.3
Kriteria Efektivitas

Keterangan	Persentase
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90% - 100%
Cukup Efektif	80% - 90%
Kurang Efektif	60% - 80%
Tidak Efektif	<60%

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

2.5 Efisiensi

2.5.1 Pengertian Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2009), pengukuran efisiensi dilakukan melalui perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai yang menggunakan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

Menurut Mahmudi (2011) efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang di hasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut.

2.5.2 Pengukuran Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan antara output yang dihasilkan dengan input yang telah digunakan. Dikatakan efisien apabila hasil kerja mencapai penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Untuk mengukur tingkat efisien yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi anggaran belanja langsung (pengeluaran seluruh biaya yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan/program di instansi selama tahun berjalan) dengan realisasi anggaran belanja secara keseluruhan selama tahun berjalan.

Menggunakan rumus realisasi anggaran belanja langsung karena belanja langsung memiliki keterkaitan secara langsung dengan kegiatan/program yang telah dilaksanakan. Jadi jumlah realisasi belanja langsung akan berubah setiap tahunnya sedangkan belanja tidak langsung jumlahnya cenderung tetap, meskipun mengalami perubahan yang tidak terlalu signifikan dan belanja langsung juga tidak memiliki keterkaitan dengan program maupun kegiatannya dalam tahun berjalan.

Untuk mencari tingkat efisiensi yaitu melalui perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja. Untuk mengukur tingkat efektivitas anggaran belanja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan bahwa kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel 2.4 :

Tabel 2.4
Kriteria Efisiensi

Keterangan	Persentase
Tidak Efisien	>100%
Kurang Efisien	90% - 100%
Cukup efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat Efisien	<60%

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

Pada bab ini penulis akan memaparkan terkait analisis deskriptif yang menjelaskan tentang data umum dan data khusus. Data umum memberikan informasi mengenai kondisi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan data khusus merupakan pembahasan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis terkait analisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja.

3.1 Data Umum

Informasi tentang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari gambaran umum, visi dan misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasinya.

3.1.1 Gambaran Umum

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY merupakan salah satu lembaga kepegawaian yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang perkembangannya dari lembaga kepegawaian yang sudah ada sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 1960 mengenai susunan organisasi di instansi Pemerintah yaitu melalui Kantor Urusan Pegawai (KUP).

KUP dipimpin oleh seorang kepala kantor yang membawahi enam bagian, mempunyai tugas pokok dalam mengerjakan testing pengangkatan, pemberhentian, pemindahan, kenaikan pangkat dan penyelesaian administrasinya, mengurus pemberian uang jajan tetap, mengurus pensiun janda, anak yatim piatu dan pembayaran pensiun serta tunjangan lainnya.

KUP terletak di Jalan Malioboro Nomor 12-14 yang terletak di Kompleks Kepatihan Danurejan Yogyakarta. Kepala Kantor Urusan Pegawai tercatat pada waktu yang menjabat adalah KRT Wirosaputro.

Pada tahun 1973, berdasarkan surat keputusan kepala daerah Provinsi DIY Nomor 18 Tahun 1973 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah Provinsi DIY, KUP berubah namanya menjadi Biro Personalia di lokasi dan gedung yang sama. Di periode ini Kepala Biro Personalia dijabat oleh Drs. KRT Suyono Kusumo. Biro Personalia mengalami perubahan nama menjadi Biro Kepegawaian Sekretariat Wilayah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1981 dengan lokasi tetap sama di eks gedung Biro Personalia. Pada tahun 1987, gedung Biro Kepegawaian dipindahkan ke lokasi yang baru tepatnya di kompleks kepatihan yang paling utara, yang sekarang menjadi gedung Biro Hukum dan Badan Kerja Sama.

3.1.2 Visi dan Misi

a. Visi Badan Kepegawaian Daerah

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki visi yaitu terwujudnya peningkatan kemuliaan martabat manusia jogja”.

Misi ini merupakan suatu kondisi yang diharapkan untuk lima tahun yang akan datang agar dapat tercapai dan dapat menuju ke arah yang lebih baik untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat yang adil dalam pelayanan publik dan mempunyai sikap integritas.

b. Misi Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah memiliki misi yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis. Misi ini merupakan perwujudan dari Panca Mulia keempat dan kelima yakni terwujudnya sikap martabat dari aparatur sipil dalam menyelenggarakan pemerintah dengan nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran,

3.1.3 Tujuan

Upaya mencapai visi dan misi tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas manajemen aparatur secara efisien dan efektif dalam pelayanan secara profesional.

3.1.4 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Kepegawaian Daerah merupakan salah satu dinas yang terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi DIY dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 77 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Kepegawaian Daerah yang mempunyai tugas yakni sebagai berikut :

1) Kepala Badan

- Bertugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah.
- Fungsi :
 - a. Menyusun program kerja badan
 - b. Melakukan pengukuran dan sertifikasi kompetensi pegawai
 - c. Melakukan pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang kepegawaian
 - d. Fasilitasi kesekretariatan Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia/Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah Istimewa Yogyakarta
 - e. Mengkoordinasi, membina dan mengawasi fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian

2) Sekretariat

- Bertugas menyelenggarakan kesekretariatan Badan.
- Fungsi :
 - a. Menyusun program kerja sekretariat
 - b. Menyusun program
 - c. Mengelola keuangan
 - d. Melaksanakan suatu program administrasi perkantoran
 - e. Mengelola data dan mengembangkan sistem informasi
 - f. Melakukan pemantuan, evaluasi, dan menyusun laporan program Sekretariat

3) Subbagian Program

- Bertugas menyusun program, pemantuan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan data informasi.
- Fungsi :
 - a. Menyusun program kerja
 - b. Melakukan perencanaan suatu program
 - c. Mengelola data, pengembangan sistem informasi dan pelayanan informasi
 - d. Melakukan pemantuan, pengendalian dan laporan program
 - e. Mengevaluasi dan penyusunan laporan kinerja
 - f. Memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan program subbagian program

4) Subbagian Keuangan

- Bertugas mengelola keuangan.
- Fungsi :
 - a. Menyusun program kerja
 - b. Mengelola keuangan
 - c. Melakukan verifikasi anggaran
 - d. Melakukan pengelolaan pendapatan pada bidang kepegawaian
 - e. menyusun pertanggungjawaban anggaran
 - f. Melakukan pemantuan, evaluasi, dan menyusun laporan subbagian keuangan

5) Subbagian Umum

- Bertugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan dan ketatalaksanaan Badan.
- Fungsi :
 - a. Menyusun program kerja
 - b. Mengelola data kepegawaian Badan
 - c. Menyiapkan bahan mutasi pegawai Badan
 - d. Pengelolaan kearsipan Badan
 - e. Penyiapan bahan ketatalaksanaan Badan

6) Bidang Perencanaan Pengadaan dan Sistem Informasi Pegawai

- Bertugas melaksanakan perencanaan, pengadaan dan sistem informasi pegawai untuk meningkatkan persentase pegawai sesuai kebutuhan pegawai dan persentase pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian terintegrasi valid dan terbaru.
- Fungsi :
 - a. Menyusun program kerja di bidang perencanaan pengadaan dan sistem informasi pegawai
 - b. Menyelenggarakan program perencanaan, pengadaan pegawai, dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian
 - c. Menyusun formasi kepegawaian
 - d. Melakukan pengelolaan database kepegawaian

- e. Melakukan pemantuan, evaluasi, dan menyusun laporan program bidang perencanaan pengadaan dan sistem informasi pegawai

7) Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai

- Bertugas melakukan perencanaan dan pengadaan pegawai.
- Fungsi :
 - a. Menyusun suatu program kerja di bidang perencanaan dan pengadaan pegawai
 - b. Melakukan fasilitasi atas pelatihan dasar dan pengujian kesehatan untuk calon pegawai ASN
 - c. Fasilitasi pemberhentian Calon Pegawai ASN
 - d. Pelaksanaan pengembalian sumpah/janji ASN
 - e. Melakukan pemantuan, evaluasi, dan penyusunan laporan

8) Subbidang Sistem Informasi Pegawai

- Bertugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi kepegawaian.
- Fungsi :
 - a. Menyusun suatu program kerja di bidang sistem informasi pegawai
 - b. Melakukan validasi database, serta penyajian informasi kepegawaian
 - c. Pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Presensi ASN Pemerintah Daerah

- d. Melakukan pemantuan, evaluasi, dan Menyusun laporan di bidang Sistem Informasi Pegawai

9) Bidang Pengembangan Pegawai

- Bertugas melaksanakan pengembangan karier, pengembangan kompetensi, promosi, dan mutasi ASN untuk meningkatkan persentase pemenuhan kompetensi pegawai.
- Fungsi :
 - a. Menyusun suatu program kerja di bidang pengembangan pegawai
 - b. Menyelenggarakan suatu program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan karier pegawai
 - c. Melakukan fasilitasi dan melaksanakan pengembangan karier, pengembangan kompetensi, promosi, dan mutasi ASN
 - d. Melakukan pemantuan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pegawai

10) Subbidang Pengembangan Kompetensi

- Bertugas melaksanakan pengembangan karier, dan pengembangan kompetensi ASN.
- Fungsi :
 - a. Menyusun program kerja di bidang pengembangan kompetensi

- b. Menyiapkan fasilitas kebijakan teknis pengembangan kompetensi
- c. Menyusun rencana pengembangan kompetensi ASN
- d. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN
- e. Melakukan pemantuan, evaluasi, dan menyusun laporan program di bidang pengembangan kompetensi

11) Subbidang Mutasi Jabatan

- Bertugas melaksanakan promosi dan mutasi ASN.
- Fungsi :
 - a. Menyusun suatu program kerja di bidang mutasi jabatan
 - b. Menyiapkan fasilitas kebijakan teknis mutasi jabatan
 - c. Melakukan pengelolaan promosi, mutasi, dan pindah wilayah kerja
 - d. Menyiapkan bahan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan
 - e. Melakukan pemantuan, evaluasi, dan menyusun laporan di bidang mutasi jabatan

12) Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai

- Bertugas meningkatkan persentase surat keputusan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu.
- Fungsi :
 - a. Menyusun suatu program kerja di bidang kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai

- b. Menyelenggarakan suatu program pembinaan kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai
- c. Melakukan penilaian kinerja ASN
- d. Melakukan pemantuan, evaluasi, dan menyusun laporan

13) Subbidang Kedudukan Hukum Pegawai

- Bertugas melaksanakan dalam pengelolaan kedudukan hukum ASN dan Pegawai Tidak Tetap.
- Fungsi
 - a. Melakukan suatu program kerja di bidang kedudukan hukum
 - b. Menyiapkan fasilitas kebijakan teknis kedudukan hukum dan pegawai
 - c. Menyiapkan bahan pemberian izin perkawinan dan penceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
 - d. Mengelola data presensi ASN
 - e. Melakukan pemantuan, evaluasi, dan menyusun laporan

14) Subbidang Kesejahteraan Pegawai

- Bertugas melakukan pengelolaan kesejahteraan pegawai.
- Fungsi :
 - a. Menyusun suatu program kerja di bidang kesejahteraan pegawai
 - b. Menyiapkan fasilitas kebijakan teknis kesejahteraan pegawai

- c. Menyiapkan bahan untuk penilaian kinerja instansi dan kinerja ASN
- d. Melakukan pemantuan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kesejahteraan pegawai

15) Bidang Tata Usaha Kepegawaian

- Bertugas melakukan pengelolaan pada mutu layanan, dokumentasi, kepangkatan, dan pensiun untuk meningkatkan nilai survei kepuasan dari pelayanan kepegawaian.
- Fungsi :
 - a. Menyusun suatu program kerja di bidang tata usaha kepegawaian
 - b. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang tata usaha kepegawaian
 - c. Menyelenggarakan suatu program untuk meningkatkan penatausahaan kepegawaian
 - d. Melakukan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
 - e. Melakukan pemantuan, evaluasi, dan menyusun laporan program di bidang tata usaha kepegawaian

16) Subbidang Pengelolaan Mutu dan Dokumentasi

- Bertugas melakukan suatu pengelolaan pada mutu layanan dan dokumentasi kepegawaian.

- Fungsi
 - a. Menyusun suatu program kerja di bidang pengelolaan mutu dan dokumentasi
 - b. Menyiapkan fasilitas kebijakan teknis pengelolaan mutu dan dokumentasi
 - c. Mengelola dan mengembangkan mutu layanan kepegawaian
 - d. Melakukan pemantuan, evaluasi, dan menyusun laporan kegiatan di bidang pengelolaan mutu dan dokumentasi

17) Subbidang Kepangkatan dan Pensiun

- Bertugas melakukan pengelolaan kepangkatan dan pensiun ASN.
- Fungsi :
 - a. Menyusun suatu program kerja di bidang kepangkatan dan pensiun
 - b. Menyusun daftar normatif bagi pegawai negeri sipil untuk kenaikan pangkat serta pensiun
 - c. Melaksanakan pembekalan pada pegawai negeri sipil menjelang pensiun
 - d. Melakukan pemantuan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kepangkatan dan pensiun

18) Unit Pelaksana Teknis

- Bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional penunjang Badan Kepegawaian Daerah.

19) Jabatan Fungsional

- Bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan keahliannya.

3.1.5 Susunan dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 77 Tahun 2018, maka Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah



Sumber : Peraturan Guberbur Nomor 77 Tahun 2018

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi DIY dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 77 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas,

fungsi, dan tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY mempunyai susunan organisasi yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Bagian Program.
 - b. Bagian Keuangan.
 - c. Bagian Umum.
3. Bidang Perencanaan Pengadaan dan Sistem Informasi Pegawai terdiri atas :
 - a. Bidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai.
 - b. Bidang Sistem Informasi Pegawai.
4. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri atas :
 - a. Bidang Pengembangan Kompetensi.
 - b. Subbidang Mutasi Jabatan
5. Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai meliputi :
 - a. Bidang Kedudukan Hukum Pegawai
 - b. Bidang Kesejahteraan Pegawai.
6. Bidang Tata Usaha Kepegawaian, terdiri atas :
 - a. Bidang Pengeloaan Mutu dan Dokumentasi
 - b. Bidang Kepangkatan dan Pensiun
7. Unit Pelaksana Teknis.
8. Jabatan Fungsional.

3.2 Data Khusus

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaporkan pertanggungjawabannya yang memuat tentang proses pelaksanaan kegiatan maupun program sesuai dengan tugas beserta pencapaian kinerja yang tercapai di periode bersangkutan. Laporan pertanggungjawaban juga mencakup hambatan ataupun kendala yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan atau program rencana pemerintah.

Setelah penulis melaksanakan kegiatan magang dan mengambil judul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2019” kemudian didapatkan hasil data sebagai berikut :

3.2.1 Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Kepegawaian Daerah

Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dengan dilakukan analisis menggunakan laporan realisasi anggaran yang ada pada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun dimulai dari tahun 2017-2019.

Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan anggaran belanja dapat dilihat melalui perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja.

Data mengenai jumlah Target Anggaran Belanja dan jumlah Realisasi Anggaran Belanja yang didapatkan dari laporan keuangan tahun anggaran 2017-2019 di lampiran 2,3 dan 4 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini dapat dilihat dari tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Belanja BKD Periode 2017-2019

Tahun	Target Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	Persentase %	Kriteria
2017	147.796.783.985,00	144.622.748.893,00	97,85	Efektif
2018	199.636.247.722,00	198.773.608.911,00	99,57	Efektif
2019	202.684.157.683,00	199.411.590.183,00	98,39	Efektif

Sumber data : diolah

Berdasarkan tabel target dan realisasi anggaran di atas, maka perhitungan tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut :

- ❖ Perhitungan tingkat efektivitas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 :

$$\begin{aligned}
 \text{Efektivitas tahun 2017} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\% \\
 &= \frac{144.622.748.893,00}{147.796.783.985,00} \times 100\% \\
 &= 97,85\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY yaitu sebesar 97,85%. Di mana realisasi anggaran belanjanya sebesar 144.622.748.893,00 dengan target anggaran belanja sebesar 147.796.783.985,00. Di mana

terdapat selisih sebesar 3.174.035.092,00. Dilihat dari tingkat persentase di atas maka dapat dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY dinilai efektif dalam melaksanakan anggaran belanjanya. Di mana rasio efektifnya antara 90-100%. Berdasarkan data di atas BKD sudah sangat baik dalam menggunakan dana, sehingga program dapat tercapai. Hal ini berarti kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY pada tahun 2017 menunjukkan kinerja yang sangat baik karena adanya peningkatan kinerja pemerintah di Badan Kepegawaian Daerah yang semakin baik karena BKD mampu merealisasikan dan menyalurkan anggaran belanja daerahnya pada seluruh program atau kegiatan selama periode 2017, realisasi anggaran belanja mendekati sasaran dan terealisasi secara optimal seperti apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa Badan Kepegawaian Provinsi DIY telah mencapai tujuannya dan dikatakan berhasil karena semua belanja sudah terealisasi sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan secara keseluruhan sudah terealisasi secara optimal. Agar anggaran belanja menjadi sangat efektif, maka perlu adanya pengawasan dan koordinasi yang lebih baik lagi dengan berbagai pihak dalam menyusun anggaran belanja agar anggaran yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan maksimal.

- ❖ Perhitungan tingkat efektivitas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 :

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas tahun 2018} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{198.773.608.911,00}{199.636.247.722,00} \times 100\% \\ &= 99,57\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 99,57%. Di mana realisasi anggaran belanjanya sebesar 198.773.608.911,00 dengan target anggaran belanja sebesar 199.636.247.722,00. Di mana terdapat selisih sebesar 862.638.811,00. Dilihat dari tingkat persentase di atas maka dapat dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY dinilai efektif dalam melaksanakan anggaran belanjanya. Di mana rasio efektifnya antara 90-100%. Berdasarkan data di atas BKD sudah sangat baik dalam menggunakan dana, sehingga program dapat tercapai. Hal ini berarti kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY pada tahun 2018 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Terjadinya peningkatan tingkat persentase efektivitas disebabkan karena adanya peningkatan kinerja pemerintah di Badan Kepegawaian Daerah yang semakin baik karena BKD mampu merealisasikan dan menyalurkan anggaran belanja daerahnya pada seluruh program atau kegiatan selama periode 2018, realisasi

anggaran belanjanya mendekati sasaran bahkan terealisasi secara optimal seperti apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa Badan Kepegawaian Provinsi DIY telah mencapai tujuannya dan dikatakan berhasil karena semua belanja sudah terealisasi sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan secara keseluruhan sudah terealisasi secara optimal. Agar anggaran belanja menjadi sangat efektif, maka perlu adanya pengawasan dan koordinasi yang lebih baik lagi dengan berbagai pihak dalam menyusun anggaran belanja agar anggaran yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan maksimal

- ❖ Perhitungan tingkat efektivitas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 :

$$\begin{aligned}
 \text{Efektivitas tahun 2019} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\% \\
 &= \frac{199.411.590.183,00}{202.684.157.683,00} \times 100\% \\
 &= 98,39\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY mengalami penurunan menjadi sebesar 98,39%. Di mana realisasi anggaran belanjanya sebesar 199.411.590.183,00 dengan target anggaran belanja sebesar 202.684.157.683,00. Di mana terdapat selisih sebesar 3.272.567.500,00. Dilihat dari tingkat persentase di atas maka dapat dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY dinilai

efektif dalam melaksanakan anggaran belanjanya. Di mana rasio efektifnya antara 90-100%. Berdasarkan data di atas BKD sudah sangat baik dalam menggunakan dana, sehingga program dapat tercapai. Hal ini berarti kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY pada tahun 2019 menunjukkan kinerja yang baik. Tingkat persentase efektivitas anggaran belanja mengalami penurunan disebabkan karena BKD kurangnya kemampuan dalam merealisasikan anggaran belanja pada berbagai program atau kegiatan selama periode 2019. Tetapi Badan Kepegawaian Provinsi DIY telah mencapai tujuannya dan dikatakan berhasil. Terjadi penurunan pada tingkat persentase juga dapat dilihat dari semakin kecil tingkat persentasenya semakin rendah pula tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja. Agar anggaran belanja menjadi sangat efektif, maka perlu adanya pengawasan dan koordinasi yang lebih baik dengan berbagai pihak dalam menyusun anggaran belanja agar anggaran yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan maksimal.

3.2.2 Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Kepegawaian Daerah

Untuk menganalisis tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja dapat dilihat melalui perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja.

Data mengenai jumlah Realisasi Belanja Langsung dan Realisasi Belanja yang didapatkan dari laporan keuangan tahun anggaran 2017-2019 di lampiran 2,3, dan 4 pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dari tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Realisasi Belanja dan Realisasi Belanja Langsung

BKD Periode 2017-2019

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Belanja Langsung	Persentase %	Kriteria
2017	144.622.748.893,00	16.059.206.336,00	11,10	Sangat Efisien
2018	198.773.608.911,00	16.070.565.947,00	08,08	Sangat Efisien
2019	199.411.590.183,00	18.795.469.162,00	09,43	Sangat Efisien

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel realisasi belanja langsung dan realisasi belanja di atas, maka perhitungan tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut :

❖ Perhitungan tingkat efisiensi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 :

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{16.059.206.336,00}{144.622.748.893,00} \times 100\% \\ &= 11,10\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY sebesar 11,10%. Di mana realisasi anggaran belanja langsungnya sebesar 16.059.206.336,00 dengan realisasi anggaran belanja sebesar 144.622.748.893,00. Dilihat dari tingkat persentase di atas maka dapat dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY dinilai sangat efisien dalam melaksanakan anggaran belanjanya. Di mana rasio efisiensinya <60%. Hal ini berarti Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY pada tahun 2017 dinilai sangat baik dan dapat menghemat dana dalam pengelolaan anggaran belanjanya. Berkaitan dengan Belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY dikatakan efisien jika realisasi belanja melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Tingkat persentase yang dicapai pada tahun 2017 menunjukkan adanya kenaikan kinerja pemerintah yang semakin membaik karena mampu merealisasikan target anggaran belanja dengan cukup baik. Jadi semakin kecil angka persentasenya maka semakin efisien anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

DIY ini menggambarkan kemampuan keuangan pemerintah daerah cukup baik.

❖ Perhitungan tingkat efisiensi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 :

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{16.070.565.947,00}{198.773.608.911,00} \times 100\% \\ &= 08,08\% \end{aligned}$$

Berdasarkan pada perhitungan di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY sebesar 08,08%. Di mana realisasi anggaran belanja langsungnya sebesar 16.070.565.947,00 dengan realisasi anggaran belanja sebesar 198.773.608.911,00. Dilihat dari tingkat persentase di atas maka dapat dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY dinilai sangat efisien dalam melaksanakan anggaran belanjanya. Di mana rasio efisiensinya <60%. Hal ini berarti Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY pada tahun 2018 dinilai sangat baik dan dapat menghemat dana dalam pengelolaan anggaran belanjanya dari tahun sebelumnya. Berkaitan dengan Belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY dikatakan efisien jika realisasi belanja melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Tingkat persentase yang dicapai pada tahun 2018 semakin sangat efisien karena adanya kenaikan kinerja pemerintah yang semakin membaik karena mampu

merealisasikan target anggaran belanja dengan cukup baik. Jadi semakin kecil angka persentasenya maka semakin efisien anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY ini menggambarkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah semakin membaik daripada tahun sebelumnya.

- ❖ Perhitungan tingkat efisiensi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 :

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{18.795.469.162,00}{199.411.590.183,00} \times 100\% \\ &= 09,43 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan pada perhitungan di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY sebesar 09,43 %. Di mana realisasi anggaran belanja langsungnya sebesar 18.795.469.162,00 dengan realisasi anggaran belanja sebesar 199.411.590.183,00.

Dilihat dari tingkat persentase di atas maka dapat dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY dinilai sangat efisien dalam melaksanakan anggaran belanjanya. Di mana rasio efisiensinya <60%. Hal ini berarti Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY pada tahun 2019 dinilai sangat baik dan dapat menghemat dana dalam pengelolaan anggaran belanjanya. Berkaitan dengan Belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY dikatakan efisien jika realisasi belanja melebihi jumlah anggaran yang telah

ditetapkan. Tingkat persentase yang dicapai pada tahun 2019 masuk dalam kategori sangat efisien karena adanya kenaikan kinerja pemerintah yang semakin membaik yang mampu merealisasikan target anggaran belanja dengan sangat baik. Semua unsur belanjanya tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi semakin kecil angka persentasenya maka semakin efisien anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY ini menggambarkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah semakin baik.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas disimpulkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2017-2019 sudah maksimal dan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY dikatakan berhasil dalam mengelola keuangan anggaran belanjanya, maka dapat dilihat dari hasil pengukuran tingkat efektivitas dan efisiensi berikut ini :

1. Efektivitas

Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa pada tahun 2017 tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja sebesar 97,85%, pada tahun 2018 tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanjanya mengalami kenaikan yaitu sebesar 99,57% dan pada tahun 2019 tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja mengalami penurunan menjadi sebesar 98,39%. Dapat disimpulkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tingkat efektivitas pelaksanaannya dari tahun 2017-2019 sudah dikatakan efektif. Di mana rasio efektifnya antara 90%-100%. Hal ini berarti Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY dari tahun 2017-2019 sudah menunjukkan kinerja

yang sangat baik. Secara keseluruhan telah terealisasi secara optimal dan telah mendekati target anggaran yang telah ditetapkan. Program yang direncanakan sudah terealisasi dengan sangat baik.

2. Efisiensi

Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada tahun 2017 yaitu sebesar 11,10%, pada tahun 2018 tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanjanya menjadi sebesar 08,08% dan pada tahun 2019 tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanjanya menjadi sebesar 09,43%.

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi dari tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan anggaran belanjanya sudah menunjukkan kriteria yang sangat efisien di mana rasio efisiensinya <60%. Hal ini berarti Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY dari tahun 2017-2019 dinilai sangat baik dan dapat menghemat dana dalam pengelolaan anggaran belanja.

4.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran agar dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Adapun saran yang diberikan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Dalam rangka menghadapi otonomi daerah dalam mempersiapkan sumber daya manusia khususnya di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta agar lebih meningkatkan tingkat efektivitasnya di

tahun yang akan datang dengan melakukan perencanaan anggaran untuk memenuhi target yang ditetapkan agar tercapai kriteria yang sangat efektif. Sebaiknya anggaran yang sudah ditargetkan dalam suatu program untuk dapat dilaksanakan agar tingkat efektivitasnya bisa tinggi atau mencapai target. Semakin ditingkatkannya kinerja khususnya Badan Kepegawaian Daerah maka terjaminnya kesejahteraan masyarakat. Sebaiknya juga dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak baik masyarakat maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan agar program tersebut dapat dilaksanakan dengan alokasi dana yang optimal. Sedangkan tingkat efisiensi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tetap mempertahankan tingkat efisiennya agar setiap tahunnya dapat mengalami perubahan yang sangat baik, di mana tingkat efisien setiap tahunnya masuk dalam kriteria yang sangat efisien. Sebaiknya juga meningkatkan pengawasan kepada semua pegawai terkait anggaran belanja yang dikeluarkan agar pengeluarannya bisa teratur sesuai dengan anggaran yang telah dilakukan dalam setiap tahunnya atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar program-program yang bersangkutan dengan masyarakat dapat dilaksanakan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Armala, S dan Pandoyo. 2020. *Implementasi PP No.90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pada Direktorat Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial*. Volume 1, No.1, November 2020, Hal 11-21
- Basri, Ramlah. 2013. *Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA*. Universitas Sam Ratulangi Manado. Volume 1, No.4, Desember 2013, Hal 202-212
- Basariyah, S. 2017. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Daerah Provinsi Daerah Sulawesi Tengah. Jurnal Katalogis*. Volume 5, No.6, Hal 63-74
- Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY. Profil Badan Kepedawaian Daerah. Yogyakarta
- Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY. Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Tahun 2017-2019. Yogyakarta
- Fitra, Halkadri. 2019. *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Jawa Tengah: CV IRDH.
- Halim dan Kusufi. 2016. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor publik*. Cetakan Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Kawatu, Freddy Samuel. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru, Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Nafarin, M. 2015. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi DIY dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 77 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Kepegawaian Daerah

Ropa, M.O. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal EMBA*. Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.4, No.2, Juni 2016, Hal 738-747

Sumenge, A.S. 2013. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Selatan. Jurnal EMBA*. Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.1, No.3, September 2013, Hal 74-81

Sujarweni, V.W. 2021. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.



LAMPIRAN

Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017
SKPD : 4.04.01.00. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Halaman : 1

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
4.	Pendapatan	1.348.150.000,00	1.317.885.000,00	(30.265.000,00)	97,76
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.348.150.000,00	1.317.885.000,00	(30.265.000,00)	97,76
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	1.348.150.000,00	1.317.885.000,00	(30.265.000,00)	97,76
	JUMLAH	1.348.150.000,00	1.317.885.000,00	(30.265.000,00)	97,76
5.	BELANJA	147.796.783.985,00	144.622.748.893,00	(3.174.035.092,00)	97,85
5.1.	Belanja Tidak Langsung	128.788.535.445,00	128.563.542.557,00	(224.992.888,00)	99,83
5.1.1.	Belanja Pegawai	128.788.535.445,00	128.563.542.557,00	(224.992.888,00)	99,83
5.2.	Belanja Langsung	19.008.248.540,00	16.059.206.336,00	(2.949.042.204,00)	84,49
5.2.1.	Belanja Pegawai	4.020.974.600,00	3.274.709.600,00	(746.265.000,00)	81,44
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.729.900.300,00	11.748.988.596,00	(1.980.911.704,00)	85,57
5.2.3.	Belanja Modal	1.257.373.640,00	1.035.508.140,00	(221.865.500,00)	82,35
	JUMLAH	147.796.783.985,00	144.622.748.893,00	(3.174.035.092,00)	97,85
	SURPLUS/(DEFISIT)	(146.448.633.985,00)	(143.304.863.893,00)	3.143.770.092,00	97,85

Yogyakarta, 31 Desember 2017

Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY



F. AGUS SUPRIYANTO
 19600318 198603 1 012

Lampiran 3: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018

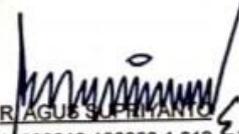
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
SKPD : 4.04.01.00. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Halaman : 1

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
4.	Pendapatan	1.494.400.000,00	1.367.050.000,00	(127.350.000,00)	91,48
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.494.400.000,00	1.367.050.000,00	(127.350.000,00)	91,48
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	1.494.400.000,00	1.364.800.000,00	(129.600.000,00)	91,33
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
	JUMLAH	1.494.400.000,00	1.367.050.000,00	(127.350.000,00)	91,48
5.	BELANJA	199.636.247.722,00	198.773.608.911,00	(862.638.811,00)	99,57
5.1.	Belanja Tidak Langsung	182.933.780.912,00	182.703.042.964,00	(230.737.948,00)	99,87
5.1.1.	Belanja Pegawai	182.933.780.912,00	182.703.042.964,00	(230.737.948,00)	99,87
5.2.	Belanja Langsung	16.702.466.810,00	16.070.565.947,00	(631.900.863,00)	96,22
5.2.1.	Belanja Pegawai	3.889.241.000,00	3.792.879.000,00	(96.362.000,00)	97,52
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.294.602.810,00	11.772.123.947,00	(522.478.863,00)	95,75
5.2.3.	Belanja Modal	518.623.000,00	505.563.000,00	(13.060.000,00)	97,48
	JUMLAH	199.636.247.722,00	198.773.608.911,00	(862.638.811,00)	99,57
	SURPLUS/(DEFISIT)	(198.141.847.722,00)	(197.406.558.911,00)	735.288.811,00	99,63

Yogyakarta, 31 Desember 2018

Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY


R. AGUS SUPRIYANTO
 19600318 198603 1 012

Lampiran 4 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

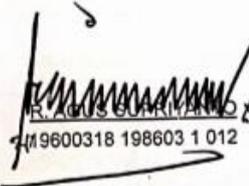
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019
SKPD : 4.04.01.00. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Halaman : 1

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
	Pendapatan	2.340.250.000,00	2.493.800.000,00	153.550.000,00	106,56
1.	Pendapatan Asli Daerah	2.340.250.000,00	2.493.800.000,00	153.550.000,00	106,56
1.2.	Hasil Retribusi Daerah	2.335.200.000,00	2.486.750.000,00	153.550.000,00	106,58
1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH	2.340.250.000,00	2.493.800.000,00	153.550.000,00	106,56
	BELANJA	202.684.157.683,00	199.411.590.183,00	(3.272.567.500,00)	98,39
1.	Belanja Tidak Langsung	181.024.187.673,00	180.616.121.021,00	(408.066.652,00)	99,77
1.1.	Belanja Pegawai	181.024.187.673,00	180.616.121.021,00	(408.066.652,00)	99,77
2.	Belanja Langsung	21.659.970.010,00	18.795.469.162,00	(2.864.500.848,00)	86,78
2.1.	Belanja Pegawai	4.664.883.840,00	3.621.575.000,00	(1.043.308.840,00)	77,63
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.718.876.170,00	14.067.531.662,00	(1.651.344.508,00)	89,49
2.3.	Belanja Modal	1.276.210.000,00	1.106.362.500,00	(169.847.500,00)	86,69
	JUMLAH	202.684.157.683,00	199.411.590.183,00	(3.272.567.500,00)	98,39
	SURPLUS/(DEFISIT)	(200.343.907.683,00)	(196.917.790.183,00)	3.426.117.500,00	98,29

Yogyakarta, 31 Desember 2019

Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY


R. Agus Guntoro
19600318 198603 1 012